

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang(Undang Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Dinas Sosial Kota Mojokerto adalah salah smatu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Kota Mojokerto yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah(kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Semoga laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang mendukung pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota Mojokerto. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mojokerto, Desember 2020
**Pit. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MOJOKERTO**

Drs. HERU SETYADI
Pembina Tk. I
NIP. 19640501 199203 1 011



**PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MOJOKERTO**

Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Mojokerto yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mojokerto, Desember 2020
**Pit. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MOJOKERTO**

Drs. HERU SETYADI
Pembina Tk. I
NIP. 19640501 199203 1 011



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Pernyataan Tanggung Jawab	II
Bab I. Pendahuluan	1
Bab II. Ringkasan Laporan Keuangan	2
a. Tabel LRA, Neraca, LO, LPE	4
Bab III. Ekonomi Makro	8
Bab. IV. Catatan Atas Laporan Keuangan	11
a. Penjelasan Umum	11
Bab V. Penjelasan Atas pos(pos Realisasi Anggaran	
a. Pagu Anggaran	20
b. Pendapatan	20
c. Belanja	20
d. Belanja Operasi	21
e. Belanja Barang dan Jasa	22
f. Belanja Modal	26
g. Belanja Hibah	26
Bab VI. Penjelasan Atas pos(pos Neraca	27
a. Aset Lancar	28
b. Aset Tetap	29
c. Aset Tetap Lainnya	30
d. Konstruksi Dalam Pengerjaan	30
e. Akumulasi Penyusutan	31
Bab VII. Penjelasan Atas Pos(pos Laporan Operasional	32
Bab VIII. Penjelasan Atas Pos(pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
Bab. IX. Pengungkapan Hal Penting Lainnya	37
Penutup	38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Sosial Kota Mojokerto disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto dalam periode pelaporan tahunan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mojokerto dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang(undangan).

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan masalah ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
3. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi, alokasi dan penggunaannya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang(undangan).
4. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Sosial Kota Mojokerto serta hasil(hasil yang telah dicapai).
5. Menyediakan informasi mengenai cara Dinas Sosial Kota Mojokerto mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial Kota Mojokerto;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

BAB II

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Sosial Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah(kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019. Realisasi Pendapatan Dinas Sosial sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00. Dan untuk Realisasi Belanja SKPD Dinas Sosial 2020 adalah sebesar Rp. 5.534.841.348,00 atau mencapai 79,24 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6.984.976.484,00.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 32.952.262.650,75 sedangkan jumlah aset untuk tahun 2019 sebesar Rp. 33.317.409.163,75 mengalami penurunan sebesar (Rp. 365.146.513,00). Jumlah aset tahun 2020 tersebut terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 0,00 mengalami penurunan jika dibandingkan jumlah tahun 2019 sebesar Rp. 960.100,00. Dan terdiri dari Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) untuk tahun 2020 sebesar Rp 32.943.757.358,75.mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah tahun 2019 sebesar (Rp. 314.347.913,00) dimana jumlah aset tetap tahun 2019 sebesar 33.258.105.271,75. Nilai Kewajiban dan Ekuitas tahun 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp. 32.952.262.650,75 mengalami penurunan sebesar (Rp. 365.146.513,00) dari tahun 2019 dimana jumlah kewajiban dan ekuitas masing-masing Rp. 0,00 dan Rp. 33.317.409.163,75.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ (defisit) dari kegiatan operasional, surplus/ (defisit) dari kegiatan non-operasional, dan surplus/ deficit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Surplus/ (Defisit) sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. (17.311.922.211,00) Jumlah tersebut terdiri atas: Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. (17.311.922.211,00) yang merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp 0,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp. 17.270.412.254,00. Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari Surplus/ (Defisit) Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp 0,00 dan Surplus/ (Defisit) Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp 41.509.957,00.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Januari 2020 adalah sebesar Rp 33.317.409.163,75 dikurangi Surplus/ (Defisit)-LO sebesar minus Rp. (17.316.642.211,00), ditambah dengan Koreksi Yang Menambah (Mengurangi) Nilai Ekuitas sebesar Rp 0,00 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 0,00 sehingga Ekuitas Dinas Sosial pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 32.947.542.650,75. Ekuitas akhir pada tahun 2020.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan (pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DINAS SOSIAL KOTA MOJOKERTO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

No	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
A.	Belanja Operasi	6.984.976.484,00	5.534.841.348,00	79,24	6.999.034.735,00
1.	Belanja Pegawai	3.857.862.594,00	2.834.367.555,00	73,47	2.975.586.196,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	3.127.113.890,00	2.700.473.793,00	86,36	3.696.841.489,00
3.	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	326.607.050,00
B.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	247.456.263,78
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	73.938.000,00
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	173.518.263,78,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.984.976.484,00)	(5.534.841.348,00)	79,24	(7.246.490.998,78)

II. NERACA

DINAS SOSIAL KOTA MOJOKERTO
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

NERACA DINAS SOSIAL Per 31 Desember 2020 dan 2019		
URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas dari Dana Non APBD	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	0,00	960.100,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	960.100,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00



Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	27.788.650.000,00	27.788.650.000,00
Peralatan dan Mesin	2.439.953.746,00	2.439.953.746,00
Gedung dan Bangunan	5.509.517.894,75	5.509.517.894,75
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	29.050.000,00	29.050.000,00
Aset Tetap Lainnya	50.044.100,00	50.044.100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(2.873.458.382,00)	(2.559.110.469,00)
JUMLAH ASET TETAP	32.943.757.358,75	33.258.105.271,75
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	8.505.292,00	17.783.792,00
Aset Lain(lain)	0,00	40.560.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	8.505.292,00	58.343.792,00
JUMLAH ASET	32.947.542.650,75	33.317.409.163,75
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00



EKUITAS		
EKUITAS	32.952.262.650,75	33.317.409.163,75
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	32.952.262.650,75	33.317.409.163,75

III. LAPORAN OPERASIONAL

**DINAS SOSIAL KOTA MOJOKERTO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

NO.	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/(PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN (LO	0,00	25.200.000,00	(25.200.000,00)	(100,00)
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah (LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah (LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain(lain PAD Yang Sah (LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER (LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya (LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan (LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN(LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (LO	0,00	25.200.000,00	(25.200.000,00)	(100,00)
8.3.1	Pendapatan Hibah (LO	0,00	25.200.000,00	(25.200.000,00)	(100,00)
8.3.2	Dana Darurat (LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya (LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	17.270.412.254,00	7.361.142.268,00	9.909.269.989,00	134,62
9.1.1	Beban Pegawai (LO	2.834.367.555,00	2.975.586.196,00	(141.218.641,00)	(4,75)
9.1.2	Beban Persediaan	11.731.332.470,00	775.900.209,00	10.955.432.261,00	1.411,96
9.1.2	Beban Jasa	2.281.536.723,00	2.533.408.221,00	(251.871.498,00)	(9,94)
9.1.2	Beban Pemeliharaan	12.046.000,00	147.035.252,00	(134.989.252,00)	(91,81)
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	87.413.050,00	235.817.007,00	(148.403.957,00)	(62,93)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	326.607.050,00	(326.607.050,00)	(100,00)
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	323.716.456,00	352.848.333,00	(29.131.877,00)	(8,26)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain(lain	0,00	13.940.000,00	(13.940.000,00)	(100,00)
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(17.270.412.254,00)	(7.335.942.268,00)	(9.934.469.986,00)	135,42
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar (LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang (LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar (LO	0,00	0,00	0,00	0,00



9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang (LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (LO	41.509.957,00	0,00	41.509.957,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(41.509.957,00)	0,00	(41.509.957,00)	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(17.311.922.211,00)	(7.335.942.268,00)	(9.975.979.943,00)	135,99
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa (LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT(LO	(17.311.922.211,00)	(7.335.942.268,00)	(9.975.979.943,00)	135,99

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DINAS SOSIAL KOTA MOJOKERTO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	33.317.409.163,75	33.406.860.432,97
SURPLUS/DEFISIT(LO	(17.311.922.211,00)	(7.335.942.268,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	1.040.000,00	0,00
Mutasi Aset Antar SKPD	11.410.894.350,00	0,00
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN R/K PPKD	5.534.841.348,00	7.246.490.998,78
EKUITAS AKHIR	32.952.262.650,75	33.317.409.163,75

BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 Ekonomi Makro

Selama tahun 2019 kebijakan pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar seiring dengan adanya reformasi dari sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik. Tuntutan terhadap pelaksanaan yang baik di era saat ini merupakan suatu kebutuhan.

Oleh karena itu, reformasi birokrasi dilakukan seiring dengan adanya tuntutan dan perubahan itu sendiri. Perubahan tersebut juga mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dalam pengelolaan keuangan, yakni paradigma pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja bercirikan : demokratis, transparansi, konservatif dan akuntabel. Penerapan prinsip tersebut dimaksudkan dan efektif sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat untuk mengimplementasikan kebijakan yang di bahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta diterapkan dengan Peraturan Daerah.

a. Struktur Ekonomi

Sebagai salah satu instrument kebijakan keuangan daerah, anggaran mempunyai peranan yang vital dalam upaya pengembangan kapabilitas sumber daya aparatur dan peningkatan efektifitas pelaksanaan pemerintahan di Kota Mojokerto, sedangkan peningkatan efektifitas ditujukan untuk menyeleraskan kapabilitasnya dengan tuntutan dan kebutuhan publik.

b. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Keadaan ekonomi Kota Mojokerto tahun 2019 dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang sulit dikendalikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Faktor internal tersebut antara lain kondisi keamanan, perda(perda, kondisi infrastruktur dan lain(lain.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran tetap akan menjadi andalan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB dan perekonomian Kota Mojokerto. Hal ini dapat dilihat dari stabilitas nilai tukar rupiah, terkendalinya laju inflasi, dan stabilitas suku bunga dalam negeri akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto. Dengan perkiraan stabilnya nilai tukar rupiah dan menurunnya tingkat suku bunga bank serta dukungan kebijakan moneter akan dapat menekan laju inflasi serta dapat mendorong lebih berkembangnya sektor riil, terutama usaha kecil dan menengah yang banyak berkembang di Kota Mojokerto.

Untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto, perlu ditingkatkan investasi sektor riil. Langkah perbaikan investasi di berbagai bidang sangat diperlukan, untuk mendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan penerimaan daerah perlu dilakukan terobosan melalui investasi. Kebutuhan dana untuk investasi tersebut antara lain dibiayai dari tabungan daerah, baik oleh Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat.

Dana(dana masyarakat tersebut selain langsung diinvestasikan sendiri, juga disalurkan antara lain melalui perbankan, pasar modal, atau lembaga keuangan lainnya seperti asuransi dan dana pensiun. Dengan pelaksanaan berbagai langkah terobosan, berbagai sumber dana daerah diharapkan dapat ditingkatkan dan menjadi sumber dana investasi, antara lain melalui peningkatan penerimaan PAD, sumber dana masyarakat (tabungan masyarakat) serta sumber dana investor.

Agar dapat menarik investor agar mau berinvestasi di Kota Mojokerto, hendaknya pemerintah mampu menciptakan iklim yang kondusif. Misalnya dengan cara menyediakan kemudahan dalam melakukan perijinan untuk usaha, stabilitas politik dan ekonomi serta penyediaan sarana(prasarana penunjang ekonomi.

c. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kota Mojokerto sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca pada Dinas Sosial Kota Mojokerto adalah bagian dari upaya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran dengan tetap memperhatikan unsur rasionalitas sesuai perkembangan yang ada dalam kaitannya dengan tingkat pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan prosedur dan mekanisme tata laksana kerja secara berkesinambungan.

Struktur pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya terhadap aspek belanja, bahwa belanja daerah diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pengelolaan keuangan daerah yang terstruktur dalam APBD dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang(undangan, efisien, ekonomis, efektif, fokus, ada komitmen, partisipatif, terobosan, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Adapun faktor(faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan posisi neraca pada Dinas Sosial Kota Mojokerto adalah berkaitan dengan program dan kegiatan sejalan dengan kebijakan daerah yang diarahkan pada upaya(upaya sebagai berikut:

- ~ Melaksanakan program(program perencanaan pembangunan, pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran, pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di tahun anggaran 2020.
- ~ Melanjutkan program pembangunan yang belum dapat dilaksanakan pada APBD tahun 2019 baik pembangunan fisik maupun non fisik.

BAB IV

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

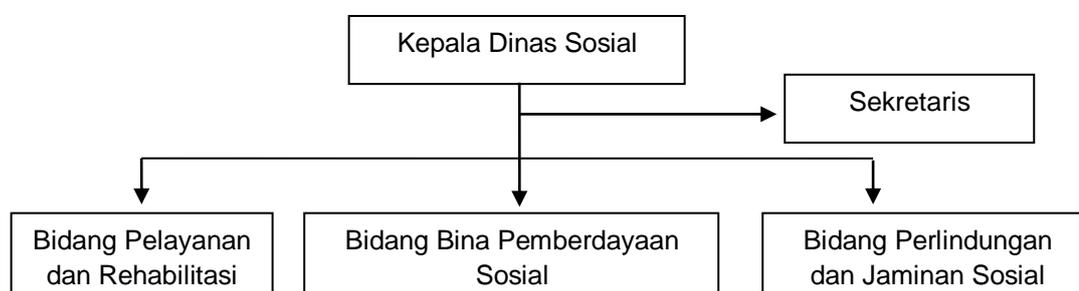
A. PENJELASAN UMUM

A1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Dinas Sosial Kota Mojokerto berlokasi di Jalan Benteng Pancasil No. 25 Mojokerto, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pencegahan, yang mengandung makna menghambat atau membatasi tumbuh kembangnya masalah kesejahteraan sosial,
- b. Rehabilitasi sosial, suatu proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial yang memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat,
- c. Perlindungan, sebagai wujud dari jaminan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi setiap warga Negara dari tindak kekerasan dan atau perlakuan salah, sesuai dengan harkat dan martabat manusia,
- d. Pemberdayaan dan Pengembangan, yang berkaitan dengan upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan berikut lingkungannya, serta peningkatan kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab sosial untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

➤ Struktur Organisasi



a) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum:
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian:
- c. Pengelolaan administrasi keuangan:
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan:
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol:
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran:
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas(tugas bidang):
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana:

- j. Pelaksanaan tugas(tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas.
- b) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi ;
1. Menyiapkan Bahan penyusunan pedoman pelayanan dan rehabilitasi Sosial, serta pembinaan lanjut bagi bekas Tuna Susila, gelandangan, pengemis, gelandangan bekas penderita psikotik, korban HIV/AIDS dan warga bekas binaan lembaga pemasyarakatan;
 2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi Sosial, serta pembinaan lanjut bagi bekas Tuna Susila, gelandangan, pengemis, gelandangan bekas penderita psikotik, korban HIV/AIDS dan warga bekas binaan lembaga pemasyarakatan;
 3. Memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi Sosial, serta pembinaan lanjut bagi bekas Tuna Susila, gelandangan, pengemis, gelandangan bekas penderita psikotik, korban HIV/AIDS dan warga bekas binaan lembaga pemasyarakatan;
 4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta pembinaan lanjut bagi bekas Tuna Susila, gelandangan, pengemis, gelandangan bekas penderita psikotik, korban HIV/AIDS dan warga bekas binaan lembaga pemasyarakatan;
 5. Menyiapkan Bahan Penyusunan pedoman pelayanan dan rehabilitasi Sosial, serta pembinaan lanjut bagi penyandang cacat tubuh, cacat netra, cacat rungu wicara, cacat mental, dan cacat bekas penderita penyakit kronis;
 6. Menyiapkan Bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi Sosial, serta pembinaan lanjut bagi penyandang cacat tubuh, cacat netra, cacat rungu wicara, cacat mental, dan cacat bekas penderita penyakit kronis;
 7. Memberikan Bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi Sosial, serta pembinaan lanjut bagi penyandang cacat tubuh, cacat netra, cacat rungu wicara, cacat mental, dan cacat bekas penderita penyakit kronis;
 8. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi Sosial, serta pembinaan lanjut bagi penyandang cacat tubuh, cacat netra, cacat rungu wicara, cacat mental, dan cacat bekas penderita penyakit kronis;
- c) Bidang Bina Pemberdayaan Sosial ;
1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial ;
 2. Menyiapkan Bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial ;
 3. Memberikan bimbingan teknis di bidang pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial ;

4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial ;
5. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pembinaan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dan penghargaan terhadap keluarga pahlawan, pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional ;
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dan penghargaan terhadap keluarga pahlawan, pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional ;
7. Memberikan bimbingan teknis pembinaan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dan penghargaan terhadap keluarga pahlawan, pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional ;
8. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dan penghargaan terhadap keluarga pahlawan, pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional ;
9. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pemberdayaan sosial ekonomi fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil ;
10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil ;
11. Memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil ;
12. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil ;
13. Melaksanakan tugas(tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.

d) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan, dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, Korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migrant terlantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumbar dana sosial oleh masyarakat ;
2. Penyusunan pedoman penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, Korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migrant terlantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumbar dana sosial oleh masyarakat ;
3. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, Korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia,

- keluarga dan pekerja migrant terlantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumbar dana sosial oleh masyarakat ;
4. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, Korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migrant terlantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumbar dana sosial oleh masyarakat ;
 5. Pengawasan penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, Korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migrant terlantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumbar dana sosial oleh masyarakat ;
 6. Pelaksanaan tugas(tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas

A2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Mojokerto per 31 Desember 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Sosial. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Dinas Sosial Kota Mojokerto.

A3. BASIS AKUNTANSI

Dinas Sosial Kota Mojokerto menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Sosial dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos(pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Sosial per 31 Desember 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip(prinsip, dasar(dasar, konvensi(konvensi, aturan(aturan, dan praktik(praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah(kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan(kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. *Pendapatan(LRA*

- ❖ Pendapatan(LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- ❖ Pendapatan(LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- ❖ Akuntansi pendapatan(LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- ❖ Pendapatan(LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

2. *Pendapatan(LO*

- ❖ Pendapatan(LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- ❖ Pendapatan(LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya
- ❖ aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan(LO pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut:
 - ~ Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - ~ Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- ❖ Akuntansi pendapatan(LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3. Belanja

- ❖ Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- ❖ Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- ❖ Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- ❖ Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- ❖ Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- ❖ Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- ❖ Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- ~ Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- ~ Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi diakui apabila telah timbul hak tagih yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/ atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila telah ada peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur secara handal
- ~ Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah
- ~ Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.

- ~ Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

b. Aset Tetap

- ~ Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- ~ Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- ~ Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2019. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/ atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- ~ Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- ~ Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain (Lain pada pos Aset Lainnya).

- ~ Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang(undangan di bidang pengelolaan BMN.

c. Penyusutan Aset Tetap

- ~ Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- ~ Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengetjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ a tau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- ~ Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- ~ Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- ~ Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/ KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

d. Piutang Jangka Panjang

- ~ Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- ~ TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/ daerah.
- ~ TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

e. Aset Lainnya

- ~ Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset ketjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- ~ Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- ~ Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- ~ Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan
- ~ berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud
- ~ Aset Lain(lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

f. Kewajiban

- ~ Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi. Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Pembelian Persediaan yang belum dibayar dari Kas Negara (belum terbit SP2D) diakui sebagai Belanja yang Masih Harus Dibayar pada tanggal Neraca.
 2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan
- ~ Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

g. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PAGU ANGGARAN

Pagu Anggaran Dinas Sosial Kota Mojokerto untuk tahun 2020 sebesar Rp. 8.415.444.580,00 dan setelah Perubahan Anggaran Kegiatan Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 6.984.976.484,00, mengalami penurunan pula jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 9.030.449.703,00,00

Tabel Pagu Anggaran Tahun 2020 dan 2019

No	Belanja	Anggaran 2020 (Rp)	Anggaran 2020 setelah perubahan (Rp)	Anggaran 2019 (Rp)
A.	Belanja Operasi	8.415.444.580,00	6.984.976.484,00	8.730.435.503,00
1.	Belanja Pegawai	3.194.662.000,00	3.857.862.594,00	3.647.836.903,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.794.455.080,00	3.127.113.890,00	5.082.598.600,00
3.	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
B.	Belanja Modal	100.000.000,00	0,00	300.014.200,00
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	114.914.200,00
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	185.100.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.415.444.580,00)	(6.984.976.484,00)	(9.030.449.703,00)

B. Pendapatan

Berdasarkan Tupoksi yang dimiliki Dinas Sosial Kota Mojokerto menyatakan bahwa Dinas Sosial bukanlah merupakan SKPD Penghasil jadi didalam laporan ini tidak ada Laporan Realisasi Pendapatan.

C. Belanja

Adapun realisasi belanja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 dan 2019, dapat di sajikan seperti tabel berikut ini :

No	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
A.	Belanja Operasi	6.984.976.484,00	5.534.841.348,00	79,24	6.999.034.735,00
1.	Belanja Pegawai	3.857.862.594,00	2.834.367.555,00	73,47	2.975.586.196,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	3.127.113.890,00	2.700.473.793,00	86,36	3.696.841.489,00
3.	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	326.607.050,00
B.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	247.456.263,78
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	73.938.000,00
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	173.518.263,78,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.984.976.484,00)	(5.534.841.348,00)	79,24	(7.246.490.998,78)

C.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai Dan Belanja Barang Dan Jasa serta belanja hibah. Berikut ini adalah penjelasan dari masing(masing belanja).

C.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 2.834.367.555,00 atau sebesar 73,47 % dari total anggaran sebesar Rp. 3.857.862.594,00 Realisasi Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji Pegawai, Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.691.659.219,00	1.208.837.100,00	71,46
2	Tunjangan Keluarga	140.733.032,00	129.933.702,00	92,33
3	Tunjangan Jabatan	98.728.000,00	104.520.000,00	105,87
4	Tunjangan Fungsional Umum	38.700.000,00	30.245.000,00	78,15
5	Tunjangan Beras	73.024.707,00	54.966.780,00	75,27
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.922.966,00	2.846.092,00	97,37
7	Pembulatan Gaji	22.321,00	14.634,00	65,56
8	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.229.580,00	2.484.205,00	76,92
9	Iuran Jaminan Kematian	9.688.769,00	7.452.603,00	76,92
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	719.661.600,00	517.226.977,00	71,87
11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	1.079.492.400,00	775.840.462,00	71,87
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.857.862.594,00	2.834.367.555,00	73,47

Dibandingkan dengan realisasi TA. 2019, pada TA. 2020 mengalami penurunan belanja pegawai sebesar Rp. 141.218.641,00 atau sebesar 4,75 %. Perbandingan realisasi belanja pegawai TA. 2020 dan TA. 2019 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**TABEL REALISASI BELANJA PEGAWAI
TAHUN 2020 DAN 2019**

No	Uraian	TA.2020	TA.2019	Bertambah/(berkurang)	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.208.837.100,00	1.246.561.200,00	(37.724.100,00)	(3,03)
2	Belanja Tunjangan Keluarga	129.933.702,00	122.606.480,00	7.327.222,00	5,98
3	Belanja Tunjangan Jabatan	104.520.000,00	101.080.000,00	3.440.000,00	3,40
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	30.245.000,00	35.270.000,00	(5.025.000,00)	(14,25)
5	Belanja Tunjangan Beras	54.966.780,00	55.256.460,00	(289.680,00)	(0,52)
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.846.092,00	3.286.774,00	(440.682,00)	(13,41)
7	Belanja Pembulatan Gaji	14.634,00	20.341,00	(5.707,00)	(28,06)



8	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.484.205,00	2.558.917,00	(74.712,00)	(2,92)
9	Iuran Jaminan Kematian	7.452.603,00	7.676.726,00	(224.123,00)	(2,92)
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	517.226.977,00	0,00	517.226.977,00	0,00
11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	775.840.462,00	0,00	775.840.462,00	0,00
12	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	0,00	1.401.269.298,00	(1.401.269.298,00)	(100,00)
	Jumlah	2.834.367.555,00	2.975.586.196,00	(141.218.641,00)	(4,75)

C.1.2 Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Sosial pada tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

a) Belanja bahan pakai habis kantor meliputi belanja sebagai berikut :

- ~ Belanja alat tulis kantor
- ~ Belanja alat listrik dan elektronik
- ~ Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
- ~ Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- ~ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
- ~ Belanja Pengisian Tabung Gas
- ~ Belanja Bahan untuk Cendramata/Souvenir
- ~ dan belanja spanduk/umbul-umbul/bendera /baliho;

b) Belanja Bahan/Material meliputi belanja sebagai berikut :

- ~ Belanja Bahan Baku Bangunan
- ~ Belanja Bahan Kimia
- ~ Belanja Bahan Harian (Sembako)
- ~ Belanja Bahan Obat (Obatan/Alat Kesehatan)
- ~ Belanja Bahan/Barang Penunjang Kegiatan

c) Belanja jasa kantor meliputi belanja sebagai berikut :

- ~ Belanja telepon
- ~ Belanja air
- ~ Belanja listrik
- ~ Belanja Kawat/Faksimili/Internet
- ~ Belanja Jasa Transaksi Keuangan
- ~ Belanja surat kabar/majalah/iklan
- ~ Belanja jasa perawatan ac
- ~ Belanja jasa perawatan komputer/jaringan terpadu
- ~ Belanja jasa perawatan barang elektronik (sound system, televisi)

- ~ Belanja jasa perawatan barang non elektronik (mesin ketik)
- ~ Belanja Operasional Pelayanan Masyarakat
- ~ Belanja jasa / tenaga kerja
- ~ Belanja jasa ahli / instruktur / narasumber;
- ~ Belanja Jasa Pengganti Uang Saku
- ~ Belanja Jasa Pengganti Uang Pembinaan
- d) Belanja Premi Asuransi meliputi belanja sebagai berikut :
 - ~ Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan
- e) Belanja perawatan kendaraan bermotor meliputi belanja sebagai berikut :
 - ~ Belanja jasa service
 - ~ Belanja penggantian suku cadang
 - ~ Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
 - ~ Belanja pajak kendaraan bermotor;
- f) Belanja cetak dan penggandaan meliputi belanja sebagai berikut :
 - ~ Belanja Cetak
 - ~ Belanja Penggandaan
 - ~ Belanja Penjilidan
 - ~ Belanja Cetak Foto/Dokumentasi;
- g) Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir meliputi belanja sebagai berikut :
 - ~ Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat
- h) Belanja sewa sarana mobilitas meliputi belanja sebagai berikut :
 - ~ Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
- i) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor meliputi belanja sebagai berikut :
 - ~ Belanja Sewa Meja Kursi
 - ~ Belanja Sewa Generator
 - ~ Belanja Sewa Tenda
 - ~ Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
 - ~ Belanja Sewa Sound System
 - ~ Belanja Sewa Alat Dekorasi
- j) Belanja makanan dan minuman meliputi belanja sebagai berikut :
 - ~ Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
 - ~ Belanja makanan dan minuman rapat
 - ~ Belanja makanan dan minuman tamu
 - ~ Belanja makanan dan minuman peserta
 - ~ Belanja Makanan dan Minuman Pasien
- k) Belanja Pakaian Kerja meliputi belanja sebagai berikut :
 - ~ Belanja Pakaian Kerja Lapangan
 - ~ Belanja Sepatu/Topi Lapangan/Atribut

- l) Belanja pakaian khusus hari dan hari(hari tertentu meliputi belanja sebagai berikut :
 - ~ Belanja Pakaian Batik Tradisional
 - ~ Belanja Pakaian Khusus Pelayanan
- m) Belanja perjalanan dinas meliputi belanja sebagai berikut :
 - ~ Belanja perjalanan dinas luar daerah
 - ~ Belanja akomodasi dan transportasi
- n) Belanja Pemeliharaan meliputi belanja sebagai berikut :
 - ~ Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
- o) Belanja jasa konsultasi meliputi belanja sebagai berikut :
 - ~ Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
 - ~ Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan
 - ~ Belanja Jasa atas Promosi Kegiatan
- p) Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS meliputi belanja sebagai berikut :
 - ~ Belanja Kursus(kursus Singkat/ Pelatihan
- q) Belanja Honorarium PNS meliputi belanja sebagai berikut :
 - ~ Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
 - ~ Belanja Honorarium PNS Lainnya
 - ~ Belanja Honorarium PNS Pengelola Keuangan

**TABEL REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA
TAHUN 2020**

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019
1.	Belanja Bahan Habis Pakai	171.571.300,00	109.767.900,00	63,98	166.999.980,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	33.077.500,00	24.370.575,00	73,68	78.146.700,00
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.984.300,00	4.556.300,00	91,41	7.666.800,00
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.035.000,00	2.240.000,00	37,12	7.667.000,00
	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	64.140.250,00	36.072.225,00	56,24	28.590.480,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	48.910.500,00	36.985.050,00	75,62	3.000.500,00
	Belanja Pengisian Tabung Gas	14.100.000,00	5.220.000,00	37,02	5.220.000,00
	Belanja Bahan untuk Cendramata/Souvenir	0	0	0,00	4.200.000,00
	Belanja Spanduk/Umbul(umbul/Bendera/Baliho	323.750,00	323.750,00	100,00	4.058.500,00
	Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Display Habis Pakai	0	0	0,00	28.450.000,00
2.	Belanja Bahan/Material	612.274.490,00	501.404.470,00	81,89	631.144.615,00

	Belanja Bahan Harian (Sembako)	264.650.500,00	205.274.950,00	77,56	198.200.930,00
	Belanja Bahan Obat (Obatan/Alat Kesehatan)	44.767.100,00	24.787.520,00	55,37	2.908.835,00
	Belanja Bahan/Barang Penunjang Kegiatan	302.856.890,00	271.342.000,00	89,59	99.677.800,00
	Belanja Bahan Baku Bangunan	0	0	0,00	3.750.000,00
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0,00	326.607.050,00
3.	Belanja Jasa Kantor	1.683.090.000,00	1.600.659.748,00	95,10	2.198.477.371,00
	Belanja Telepon	1.800.000,00	563.613,00	31,31	656.002,00
	Belanja Air	1.500.000,00	1.013.980,00	67,60	0,00
	Belanja Listrik	73.800.000,00	64.090.655,00	86,84	61.652.232,00
	Belanja Surat Kabar/Majalah/Iklan	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	50.140.001,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	30.000.000,00	26.521.500,00	88,41	25.429.136,00
	Belanja Paket/Pengiriman	0,00	0,00	0,00	58.000,00
	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Transfer, Pajak Bunga, Administrasi)	800.000,00	210.000,00	26,25	140.000,00
	Belanja Jasa Perawatan AC	6.950.000,00	3.410.000,00	49,06	4.880.000,00
	Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu	2.000.000,00	1.840.000,00	92,00	2.985.000,00
	Belanja Jasa Perawatan Non Komputer/Elektronik (Meubelair dll)	0	0	0,00	237.500,00
	Belanja Jasa Perawatan Barang Elektronik (Sound System, Televisi dll)	4.000.000,00	1.751.000,00	43,78	2.000.000,00
	Belanja Jasa Perawatan Barang Non Elektronik (Mesin Ketik dll)	0	0	0,00	1.358.250,00
	Belanja Operasional Pelayanan Masyarakat	20.000.000,00	1.150.000,00	5,75	7.050.000,00
	Belanja Jasa/ Tenaga Kerja	1.415.610.000,00	1.382.104.000,00	97,63	1.137.299.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.650.000,00	22.650.000,00	100,00	638.690.250,00
	Belanja Jasa Pengganti Uang Saku	98.480.000,00	89.855.000,00	91,24	261.500.000,00
	Belanja Jasa atas Promosi Kegiatan	0	0	0,00	4.402.000,00
4.	Belanja Premi Asuransi	74.880.000,00	66.323.475,00	88,57	49.969.000,00
	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	74.880.000,00	66.323.475,00	88,57	49.969.000,00
5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.400.000,00	12.046.000,00	69,23	62.345.252,00
	Belanja Jasa Service	3.400.000,00	3.195.000,00	93,97	13.178.500,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.500.000,00	4.205.000,00	93,44	2.051.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	0	0	0,00	42.380.152,00
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.500.000,00	4.646.000,00	48,91	4.735.600,00
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.380.500,00	62.637.900,00	91,60	50.321.900,00
	Belanja Cetak	58.940.500,00	58.840.500,00	99,83	31.212.000,00
	Belanja Penggandaan	2.943.600,00	2.773.400,00	94,22	14.888.400,00
	Belanja Penjilidan	39.000,00	39.000,00	100,00	115.000,00



	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi	6.457.400,00	985.000,00	15,25	4.106.500,00
7.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	77.647.350,00
	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Lapangan/Kolam Renang	0	0	0,00	5.500.000,00
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0	0	0,00	1.400.000,00
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0	0	0,00	1.000.000,00
	Belanja Sewa Meja Kursi	0	0	0,00	5.989.250,00
	Belanja Sewa Proyektor	0	0	0,00	358.100,00
	Belanja Sewa Tenda	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	0,00
	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0	0	0,00	14.000.000,00
	Belanja Sewa Sound System	0	0	0,00	4.400.000,00
	Belanja Sewa Alat Dekorasi	0	0	0,00	45.000.000,00
8.	Belanja Makanan dan Minumam	56.236.000,00	50.086.250,00	89,06	159.306.564,00
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.346.000,00	21.670.000,00	92,82	35.903.364,00
	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.800.000,00	9.610.250,00	81,44	11.716.600,00
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	21.090.000,00	18.806.000,00	89,17	111.686.600,00
9.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	21.425.000,00	14.320.000,00	66,84	76.060.000,00
	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	21.425.000,00	14.320.000,00	66,84	60.305.000,00
	Belanja Sepatu/Topi Lapangan/Atribut	0	0	0,00	4.005.000,00
	Belanja Pakaian Olahraga	0	0	0,00	11.750.000,00
10.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	17.250.000,00
	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0	0	0,00	17.250.000,00
11.	Belanja Perjalanan Dinas	108.279.100,00	87.413.050,00	80,73	235.817.007,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0	0	0,00	600.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.279.100,00	87.413.050,00	80,73	136.269.573,00
	Belanja Akomodasi dan Transportasi	0	0	0,00	98.947.434,00
12.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	90.795.000,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	84.690.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0	0	0,00	3.575.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0	0	0,00	2.530.000,00
13.	Belanja Honorarium PNS	311.327.500,00	193.565.000,00	62,17	207.314.500,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	195.450.000,00	96.950.000,00	49,60	113.625.000,00
	Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan	875.000,00	0	0,00	0,00
	Honorarium PNS Pengelola Keuangan	115.002.500,00	96.615.000,00	84,01	93.689.500,00
TOTAL		3.127.113.890,00	2.700.473.793,00	86,36	4.023.448.539,00

C.1.3 Belanja Modal

Adapun Tahun 2020 untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak ada Belanja Modal.

C.1.4 Belanja Hibah / Barang Yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat

Adapun realisasi belanja Hibah / Barang Yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat yang menggunakan anggaran BELANJA TIDAK TERDUGA PENANGANAN DARURAT COVID-19 sebesar Rp. 11.410.484.850,00. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing belanja.

No	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1	Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan	63.750.000
2	Honorarium Non PNS	540.000
3	Honorarium tenaga kebersihan	3.500.000
4	Belanja Alat Tulis Kantor	7.080.000
5	Belanja Bahan Harian (Sembako)	10.849.845.250
6	Belanja kawat/faksimile/internet/intranet/tv kabel/tv satelit	4.043.000
7	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Transfer,Pajak Bunga,Administrasi)	70.000
8	Belanja Jasa/Tenaga Kerja	346.835.500
9	Belanja Cetak	1.841.500
10	Belanja Penggandaan	466.600
11	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	132.513.000
		11.410.484.850

BAB VI

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 32.952.262.650,75 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 0,00 dan Aset Tetap sebesar Rp. 32.943.757.358,75 serta Aset Lainnya sebesar Rp. 8.505.292,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 32.952.262.650,75. Komposisi neraca 2020 dan 2019 dapat disajikan seperti dibawah ini :

NERACA		
DINAS SOSIAL		
Per 31 Desember 2020 dan 2019		
URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas dari Dana Non APBD	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	0,00	960.100,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	960.100,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00



ASET TETAP		
Tanah	27.788.650.000,00	27.788.650.000,00
Peralatan dan Mesin	2.439.953.746,00	2.439.953.746,00
Gedung dan Bangunan	5.509.517.894,75	5.509.517.894,75
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	29.050.000,00	29.050.000,00
Aset Tetap Lainnya	50.044.100,00	50.044.100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(2.873.458.382,00)	(2.559.110.469,00)
JUMLAH ASET TETAP	32.943.757.358,75	33.258.105.271,75
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	8.505.292,00	17.783.792,00
Aset Lain(lain)	0,00	40.560.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	8.505.292,00	58.343.792,00
JUMLAH ASET	32.947.542.650,75	33.317.409.163,75
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	32.952.262.650,75	33.317.409.163,75
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	32.952.262.650,75	33.317.409.163,75

A. ASET LANCAR

A.1 Persediaan

Cadangan persediaan sampai dengan akhir tahun 2020 pada Dinas Sosial adalah sebesar Rp. 0,00 dikarenakan adanya kebijakan *refocusing* anggaran.



B. ASET TETAP

Aset tetap merupakan aset/kekayaan yang berwujud yang mempunyai masa lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau pun masyarakat umum dan dicatat sebesar biaya perolehan. Aset Tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan aset tetap. Aset tetap Dinas Sosial Kota Mojokerto sampai dengan akhir Desember 2020 adalah senilai Rp 32.943.757.358,75. Dibandingkan dengan tahun 2019, posisi aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp. (373.651.805,00), sebagaimana tabel dibawah ini

NO	URAIAN	2020	2019	BERTRAMBAH/ (BERKURANG)	(%)
1	Tanah	27.788.650.000	27.788.650.000	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	2.439.953.746	2.439.953.746	0,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	5.509.517.895	5.509.517.895	0,00	0,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	29.050.000	29.050.000	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	50.044.100	50.044.100	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(2.873.458.382,00)	(2.559.110.469)	(314.347.913,00)	(10,94)
		32.943.757.358,75	33.317.409.163,75	(373.651.805,00)	(1,13)

B.1 Tanah

Jumlah aset tetap tanah untuk Tahun 2020 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Tahun 2019 dikarenakan tidak ada mutasi masuk ataupun mutasi keluar aset tanah ataupun pengadaan tanah, yaitu sebesar Rp. 27.788.650,00, sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	URAIAN	2020	2019	BERTRAMBAH/(BE RKURANG)	(%)
1	Tanah	27.788.650.000,00	27.788.650.000,00	0,00	0,00

B.2 Peralatan dan Mesin

Jumlah aset tetap Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2020 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Tahun 2019 dikarenakan tidak ada mutasi masuk ataupun mutasi keluar asset Peralatan dan Mesin, yakni 2.439.953.746,00 sebagaimana tabel dibawah ini

NO	URAIAN	2020	2019	BERTRAMBAH/(BE RKURANG)	(%)
1	Peralatan dan Mesin	2.439.953.746,00	2.439.953.746,00	0,00	0,00

B.3 Gedung dan Bangunan

Jumlah aset tetap gedung dan bangunan untuk Tahun 2020 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Tahun 2019 dikarenakan tidak ada mutasi masuk ataupun mutasi keluar aset Gedung dan Bangunan, yakni 5.509.517.895,00 sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	URAIAN	2020	2019	BERTRAMBAH/(BERKURANG)	(%)
1	Gedung dan Bangunan	5.509.517.895,00	5.509.517.895,00	0,00	0,00

B.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan untuk Tahun 2020 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Tahun 2019 dikarenakan tidak ada mutasi masuk ataupun mutasi keluar aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, yakni 29.050.000,00 sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	URAIAN	2020	2019	BERTRAMBAH/(BERKURANG)	(%)
1	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	29.050.000,00	29.050.000,00	0,00	0,00

B.5 Aset Tetap Lainnya

Jumlah aset tetap lainnya untuk Tahun 2020 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Tahun 2020 dikarenakan tidak ada mutasi masuk ataupun mutasi keluar aset tetap lainnya ataupun pengadaan aset tetap lainnya yaitu sebesar Rp. 50.044.100,00, sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	URAIAN	2020	2019	BERTRAMBAH/(BERKURANG)	(%)
1	Aset Tetap Lainnya	50.044.100,00	50.044.100,00	0,00	0,00

B.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jumlah konstruksi dalam pengerjaan untuk Tahun 2020 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 0,00 sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	URAIAN	2020	2019	BERTRAMBAH/(BERKURANG)	(%)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00

B.7 Akumulasi penyusutan

Jumlah akumulasi penyusutan untuk Tahun 2020 mengalami perubahan penyusutan yaitu sebesar Rp. (314.347.913,00) atau sebesar 10,94 % dibandingkan dengan Tahun 2019 sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	URAIAN	2020	2019	BERTRAMBAH/(BERKURANG)	(%)
1	Akumulasi Penyusutan	(2.873.458.382,00)	(2.559.110.469)	(314.347.913,00)	(10,94)

Adapun untuk Tahun 2020 jumlah akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu	(31.303.334,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(336.762.000,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	(3.270.542,00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	(1.175.000,00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(4.950.000,00)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(168.533.770,00)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(610.851.914,00)
8	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(83.141.633,00)
9	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(59.504.529,00)
10	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(6.350.000,00)
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	(4.690.625,00)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	(38.440.000,00)
13	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium	(3.850.000,00)
14	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit	(369.217.039,00)
15	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	(148.670.844,00)
16	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(765.874.668,00)
17	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(126.074.583,00)
18	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	(11.037.693,00)
19	Akumulasi Penyusutan Tugu/Tanda Batas	(31.892.291,00)
20	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	(15.680.000,00)
21	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon	(6.112.917,00)
22	Akumulasi Penyusutan Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00
23	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian	(46.075.000,00)
24	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00
	Jumlah	(2.873.458.382,00)

BAB VII

PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

A. Pendapatan – LO

Berdasarkan Tupoksi yang dimiliki Dinas Sosial, bahwa Dinas Sosial bukan merupakan SKPD penghasil maka dari itu Pendapatan – LO pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 adalah Rp. 0,00

B. Beban

Beban terdiri dari :

1. Beban Operasi yang terdiri dari :
 - 1.1. Beban Pegawai – LO
 - 1.2. Beban Barang dan Jasa
 - 1.3. Beban Bunga
 - 1.4. Beban Subsidi
 - 1.5. Beban Hibah
 - 1.6. Beban Bantuan Sosial
 - 1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - 1.8. Beban Penyisihan Piutang
 - 1.9. Beban Lain-lain
2. Beban Transfer yang terdiri dari :
 - 2.1. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
 - 2.2. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
 - 2.3. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah
Lainnya
 - 2.4. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
 - 2.5. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
 - 2.6. Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
3. Defisit Non Operasional yang terdiri dari :
 - 3.1. Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO
 - 3.2. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO
 - 3.3. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO
4. Beban Luar Biasa yang terdiri dari :
 - 4.1. Beban Luar Biasa

Beban pada Dinas Sosial adalah sebesar Rp. 17.270.412.254,00 Adapun rincian beban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL BEBAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Pegawai - LO	2.834.367.555,00	2.975.586.196,00	(141.218.641,00)	(4,75)
2	Beban Persediaan	11.731.332.470,00	775.900.209,00	10.955.432.261,00	1.411,96
3	Beban Jasa	2.281.536.723,00	2.533.408.221,00	(251.871.498,00)	(9,94)
4	Beban Pemeliharaan	12.046.000,00	147.035.252,00	(134.989.252,00)	(91,81)
5	Beban Perjalanan Dinas	87.413.050,00	235.817.007,00	(148.403.957,00)	(62,93)
6	Beban Bunga	0	0	0,00	0
7	Beban Subsidi	0	0	0,00	0
8	Beban Hibah	0	326.607.050,00	(326.607.050,00)	(100)
9	Beban Bantuan Sosial	0	0	0,00	0
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	323.716.456,00	352.848.333,00	(38.410.377,00)	(10,89)
11	Beban Penyisihan Piutang	0	0	0,00	0
12	Beban Lain(lain	0	13.940.000,00	(13.940.000,00)	(100)
13	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0	0	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(17.270.412.254,00)	(7.335.942.268,00)	(9.934.469.986,00)	135,42

B1. Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai – LO pada Dinas Sosial sebesar Rp. 2.834.367.555,00 terdiri dari Gaji Pegawai Dan Tambahan Penghasilan PNS, di uraikan dalam tabel sebagai berikut :

Beban Pegawai – LO

No	Uraian	TA.2020
1	Beban Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.208.837.100,00
2	Beban Belanja Tunjangan Keluarga	129.933.702,00
3	Beban Belanja Tunjangan Jabatan	104.520.000,00
4	Beban Belanja Tunjangan Fungsional Umum	30.245.000,00
5	Beban Belanja Tunjangan Beras	54.966.780,00
6	Beban Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.846.092,00
7	Beban Belanja Pembulatan Gaji	14.634,00
8	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.484.205,00
9	Iuran Jaminan Kematian	7.452.603,00
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	517.226.977,00
11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	775.840.462,00
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	0,00
	Jumlah	2.834.367.555,00

B2. Beban Persediaan

Beban persediaan Tahun 2020 pada Dinas Sosial sebesar Rp. 11.731.332.470,00 sebagaimana dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Bahan Pakai Habis	117.884.500,00
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	11.351.249.720,00
3	Beban Cetak dan Penggandaan	65.279.000,00
4	Beban Makanan dan Minuman	182.599.250,00
5	Beban Pakaian Kerja	14.320.000,00
	Jumlah	11.731.332.470,00

B.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada Dinas Sosial sebesar Rp. 2.281.536.723,00 sebagaimana dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Beban Barang dan Jasa Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Jasa Kantor	1.951.608.248,00
2	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00
3	Beban Premi Asuransi	66.323.475,00
4	Beban Honorarium Non Pegawai	3.500.000,00
5	Beban Honorarium PNS - LO	257.315.000,00
6	Beban Honorarium Non PNS - LO	540.000,00
	Jumlah	2.281.536.723,00

B.4 Beban Penyusutan dan Amortasi

Beban penyusutan dan Amortasi Pada Dinas Sosial Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 323.716.456,00 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel Beban Penyusutan dan amortisasi
Tahun 2020**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	3.335.000,00
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	29.556.000,00
3	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	317.500,00
4	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	150.000,00
5	Beban Penyusutan Alat Kantor	18.050.543,00
6	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	86.119.967,00
7	Beban Penyusutan Komputer	49.207.114,00
8	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.083.634,00
9	Beban Penyusutan Alat Studio	8.291.919,00
10	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	592.500,00
11	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	4.251.667,00
12	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	70.143.502,00
13	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	23.511.940,00
14	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	1.720.160,00
15	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	9.201.510,00
16	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	1.960.000,00
17	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	945.000,00
18	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	9.278.500,00
	JUMLAH	323.716.456,00

BAB VIII

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas pada Dinas Sosial Kota Mojokerto Tahun 2020 dapat disajikan pada tabel berikut, dimana ekuitas akhir pada Dinas Sosial Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 32.952.262.650,75.

Tabel Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	33.317.409.163,75	33.406.860.432,97
SURPLUS/DEFISIT(LO)	(17.311.922.211,00)	(7.335.942.268,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	1.040.000,00	0,00
Mutasi Aset Antar SKPD	11.410.894.350,00	0,00
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN R/K PPKD	5.534.841.348,00	7.246.490.998,78
EKUITAS AKHIR	32.952.262.650,75	33.317.409.163,75

BAB IX

PENGUNGKAPAN HAL PENTING LAINNYA

REKENING SKPD

Dinas Sosial Kota Mojokerto mempunyai 2 (dua) buah rekening sebagai berikut :

No	Nama Bank	No. Rekening	Saldo Per 31 Des 2020	Status Aktif/Ditutup	Peruntukan	SK Walikota
1	Bank Jatim	0161012386	0,00	Aktif	Rekening Kas Bendahara Pengeluaran	188.45/55/417.111/2017 Tgl 3 Januari 2017
2	Bank BNI	549803979	0,00	Aktif	Rekening Penampungan BPNT	188.45/918/417.111/2017 Tgl 10 Mei 2017

BAB X

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Sosial Kota Mojokerto ini, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang(undangan yang berlaku. Laporan Keuangan tersebut mencakup :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Demikian Laporan Keuangan ini kami susun, semoga dapat memberikan gambaran keadaan keuangan pada Dinas Sosial Kota Mojokerto.

Mojokerto, Desember 2020

**Pt. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA MOJOKERTO**

Drs. HERU SETYADI

Pembina Tk. I

NIP. 19640501 199203 1 011

